

BAB II

DINAMIKA SEJARAH HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA-MALAYSIA

Pada dasarnya untuk mencapai kepentingan suatu negara, banyak negara yang melakukan kerjasama internasional untuk mencapai tujuan tertentu. Selain melakukan kerjasama multilateral yang melibatkan banyak negara, terdapat juga kerjasama antar dua negara yang biasa disebut kerjasama bilateral. Dalam kasus ini, hubungan bilateral terjadi diantara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam penanganan kejahatan transnasional, khususnya perdagangan narkoba internasional di Kepulauan Riau.

Untuk itu, sebelum kemudian menjelaskan terkait dengan program kerjasama yang telah dibangun oleh kedua belah pihak, dalam bab ini, penulis akan coba menguraikan latar belakang sejarah dan dinamika hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia sejak era konflikual sampai dengan saat kedua negara banyak menjalin kerjasama.

A. Era Konflikual

Indonesia dan Malaysia secara resmi menjalin hubungan pada tahun 1957, saat itu Malaysia masih disebut dengan nama Tanah Melayu yang mendapatkan kemerdekaan dari Inggris²³. Indonesia merupakan salah satu diantara negara pertama yang membuka hubungan diplomatik terhadap Malaysia²⁴

²³ Maksum, Ali. "*Menyingkap Takbir Hubungan Indonesia-Malaysia*". (Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta, 2017), hlm. 13

²⁴ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. "*Malaysia-Indonesia Miliki Hubungan Sejarah Kuat*". Diakses dari <https://www.uinjkt.ac.id/id/malaysia-indonesia-miliki-hubungan-sejarah-kuat/#more-2682> Pada tanggal 25 Januari 2019 pukul 23.22 WIB

Namun hubungan kerjasama Indonesia dan Malaysia penuh dengan dinamika, naik turun dalam hubungan terus terjadi di setiap era kepemimpinan masing-masing Presiden.

Sejarah hubungan Indonesia dan Malaysia sebenarnya sudah terjalin sejak sebelum kemerdekaan, karena adanya faktor ikatan “nasionalisme” diantara pemuda-pemuda dua bangsa ini untuk melawan penjajahan. Dalam hubungan Indonesia dan Malaysia, banyak yang menjadi penentu sikap politik antar dua negara ini, contohnya seperti tahun 1963 hingga 1966, Indonesia dan Malaysia memiliki arah haluan yang berbeda, Indonesia cenderung dengan blok komunis dan Malaysia kedalam blok kapitalis²⁵.

Dalam perjalanan kerjasama Indonesia dan Malaysia yang telah terjalin selama 62 tahun, hubungan yang naik turun menjadi jalan cerita bagi kerjasama kedua negara.

1. Era Pemerintahan Soekarno

Era pemerintahan Soekarno adalah era dimana Indonesia memulai kerjasama dengan Malaysia, tepatnya di tahun 1957. Sejak hubungan di mulai hingga digantikannya Soekarno sebagai presiden hubungan Indonesia dan Malaysia diwarnai dengan naik turun intensitas keharmonisan, dan menjadi lebih sedikit buruk ketika memasuki 4 tahun terakhir sebelum Soekarno tidak lagi menjabat sebagai Presiden Indonesia²⁶.

Berawal dari berbeda haluannya kedua negara dalam penentuan arah politik internasional, Indonesia dengan Soekarno yang lebih mengarah ke blok komunis dan Malaysia dengan Tunku Abdul Rahman yang mengarah ke blok Kapitalis membuat dua negara ini sedikit mengalami berbagai macam ketegangan. Seperti saat Indonesia membutuhkan

²⁵ Maksum, Ali, Op.cit., hlm.34

²⁶ Maksum, Ali, Op.cit., hlm. 14-16

dukungan Malaysia untuk mempertahankan Irian Barat, Malaysia lebih memilih untuk abstain, yang kemudian membuat Soekarno saat itu menjadi marah terhadap Perdana Menteri Tanah Melayu Tunku Abdul Rahman²⁷.

Kemudian di tahun 1963 hubungan buruk antara kedua negara terus terjadi saat akan dibentuknya negara Federasi Malaysia yang akan mempersatukan bagian Sabah dan Serawak dengan Tanah Melayu. Soekarno menganggap itu sebagai suatu penjajahan bentuk baru yang dilakukan oleh Inggris dan menentang keras rencana dibentuknya Negara Federasi Malaysia, dan yang menjadikan Soekarno benar-benar marah adalah ketika Soekarno tidak diberitahukan rencana Penyatuan Sabah dan Serawak dengan Tanah Melayu menjadi Negara Federasi Malaysia.

Ketegangan ini terus berlanjut ketika Soekarno mencoba untuk membuat Malaysia menjadi terprovokasi dengan mengancam akan melakukan segala upaya untuk membuat gagal pembentukan Negara Federasi Malaysia. Hubungan kedua negara kemudian diperparah dengan aksi konfrontasi Soekarno terhadap Malaysia dengan keluarnya slogan “Ganyang Malaysia”²⁸.

Istilah ”ganyang Malaysia” adalah istilah yang diucapkan oleh Presiden Soekarno yang kemudian dipopulerkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu Soebandrio di tanggal 20 Januari 1963. Istilah itu juga dipertegas saat Soekarno mulai kegusaran terhadap demonstran yang dilakukan oleh rakyat Malaysia di Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur tahun 1963 dimana para pendemo merobek foto Soekarno dan kemudian lambang Negara Indonesia Garuda Pancasila dibawa ke depan Perdana Menteri Tunku Abdul

²⁷ Maksum, Ali, Op.cit., hlm. 14-16

²⁸ Maksum, Ali, Op.cit., hlm. 14-16

Rahman, dan kemudian demonstran meminta Tunku Abdul Rahman untuk menginjak lambang Garuda²⁹.

Dalam usahanya melakukan Konfrontasi Indonesia dengan dipimpin Soekarno membentuk Komando Ganyang Malaysia (KOGAM) dan kemudian mengirimkan Tentara Nasional Indonesia keperbatasan Indonesia dan Malaysia di Sabah dan Sarawak. Konfrontasi ini dilakukan secara senyap tanpa pemberitaan resmi dari kedua negara yang bersangkutan³⁰.

Dalam masalah ini, Indonesia dan Filipina sudah menyetujui untuk kemudian menerima pembentukan Negara Federasi Malaysia dengan catatan sebagian besar masyarakat yang berada didaerah pembentukan Negara Federasi Malaysia setuju melalui referendum yang di wadahi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tetapi sebelum hasil referendum keluar, Negara Federasi Malaysia sudah resmi berdiri pada tanggal 16 September 1963 yang kemudian menguatkan alasan untuk Indonesia menganggap bahwa pembentukan Negara Federasi Malaysia adalah bukti rencana neokolonialisme³¹.

Pertempuran yang terjadi di perbatasan Kalimantan adalah pertempuran kecil-kecilan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Inggris yang menjadi sekutu Malaysia. Konfrontasi Kemudian berakhir ketika Soekarno digantikan oleh Soeharto dalam menduduki kuris kepresidenan Republik Indonesia. Korban dalam pertempuran ini memakan korban dari kedua belah pihak, sekitar 590 orang di pihak Indonesia dan pihak Inggris dan sekutu sebanyak 114 orang.

²⁹ Susanto Pudjomartono. "*Ganyang Malaysia?*". Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2010/09/08/08135067/Ganyang.Malaysia> pada tanggal 15 Februari 2019 Pukul 19.16 WIB

³⁰ Maksum, Ali, Op.cit., hlm. 16

³¹ Susanto Pudjomartono. Loc.it.

Selain itu ketika didalam masa konfrontasi, Malaysia direncanakan di tahun 1964 akan diangkat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dan ketika Soekarno mendengar isu tersebut, Soekarno mengancam akan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memutuskan seluruh bantuan dari organisasi dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal itu menjadi kenyataan ketika Malaysia kemudian diangkat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 1965³².

2. Era Pemerintahan Soeharto

Dalam era Soeharto konflik antara Indonesia dengan Malaysia tidak terlalu tegang saat Indonesia dipimpin oleh Soekarno. Tetapi sedikit banyak hubungan Indonesia dan Malaysia di era kepemimpinan Soeharto terdapat perselisihan yang terjadi.

Salah satunya ketika di tahun 1980 an di akhir era perang dingin, politik luar negeri Indonesia dan Malaysia mengalami perubahan, dikarenakan penyesuaian terhadap situasi internasional pasca perang dingin antara Amerika dan Rusia. Secara tidak langsung Indonesia dan Indonesia terlibat rivalitas. Kemajuan pembangunan dua negara yang terbilang kontras menjadi awal mulanya rivalitas tersebut. Indonesia dan Malaysia juga mencoba bersaing untuk mendapatkan kedudukan di institusi internasional seperti di Gerakan Non Blok (GNB), dialog antara Utara dan Selatan juga dialog Selatan dengan Selatan³³.

Hubungan diplomatik kedua negara sedikit memburuk ketika Indonesia dianggap Malaysia memiliki citra buruk, salah satunya adalah karena Indonesia sebagai negara yang

³² Akhmad Muawal Hasan. "*Gara-Gara Malaysia, Indonesia Keluar dari PBB*". diakses dari <https://tirto.id/gara-gara-malaysia-indonesia-keluar-dari-pbb-cCpg> pada tanggal 15 Februari pukul 19.53 WIB

³³ Maksum, Ali, Op.cit., hlm. 23-25

sering mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal dan juga buruh kasar. Di sisi lainnya, dengan adanya TKI di Malaysia, menjadi pengganggu stabilitas dalam negeri, contohnya adalah keterlibatan terhadap “pendatang haram” dalam berbagai kriminal.

3. Era Pemerintahan BJ Habibie

Di era kepemimpinan BJ Habibie, perubahan sikap terjadi oleh Indonesia terhadap Malaysia, dimana pihak Malaysia menuduh Indonesia mencampuri situasi dalam negeri Malaysia. salah satu sumber ketegangan antara kedua negara adalah ketika para pemimpin Indonesia memberikan komentar-komentar terhadap kasus penangkapan dan juga pemecatan Anwar Ibrahim sebagai Deputy Perdana Menteri Malaysia.

Dalam kasus tersebut, Malaysia menganggap BJ Habibie terlalu mencampuri dengan mengomentari terlalu dalam atas kasus tersebut. Tentunya pihak Malaysia menjadi gusar terhadap tindakan pemimpin Indonesia tersebut, tentunya hal itu kembali memanas hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia³⁴.

4. Era Pemerintahan Megawati

Di era pemerintahan Megawati, konflik yang paling mendapatkan perhatian adalah ketika Indonesia kalah dalam persidangan di Mahkamah Internasional terhadap perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan.

Pulau Sipadan dan Ligitan adalah pulau yang letaknya berada di perbatasan Indonesia dan Malaysia, tepatnya di bagian Kalimantan Timur untuk Indonesia dan di bagian Sabah untuk Malaysia. Persengkataan ini mulai terjadi ketika pembahasan batas kontinen bagi kedua negara yakni pada

³⁴ Maksum, Ali, Op.cit., hlm, 26-27

tahun 1969. Hal yang kemudian sangat menjadi penting bagi kedua negara ini adalah Pulau Sipadan dan Ligitan dijadikan sebagai titik baselines untuk diambil batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)³⁵.

Dengan sengketa ini juga menjadi halangan bagi keharmonisan Indonesia dan Malaysia yang telah terjalin sejak awal kemerdekaan Malaysia. Kemudian di tahun 1996 terjadi perundingan oleh pihak dari kedua negara, diwakilkan langsung oleh kedua Presiden, Soeharto dan Tun Mahatir melakukan pertemuan dan kemudian menyepakati bahwa kasus Sipadan dan Ligitan akan dibawa ke Mahkamah Internasional, dua tahun setelah pertemuan ini, tepatnya ditahun 1998 kasus Sipadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional³⁶.

Setelah melalui proses panjang, di akhir tahun 2002 Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan bahwa yang memenangkan kasus ini adalah Malaysia dengan dasar otoritas yuridis, administratif, legislatif yang berkelanjutan oleh Malaysia dan juga sebagai negara pewaris dari konolial Inggris³⁷.

Hasil keputusan ini sangat membuat hubungan Indonesia dan Malaysia menjadi sangat tidak harmonis, sebagian besar pihak Indonesia tidak menerima keputusan yang telah ditetapkan dan mengkritik keras Presiden saat itu yakni Megawati Soekarno Putri, walaupun Megawati bukanlah yang memutuskan penyelesaian kasus ini, pemerintahan Megawati tetap menjadi sasaran kritik seluruh elemen masyarakat Indonesia, terkhusus para politisi³⁸.

³⁵ Ali Muhammad dan Ali Maksum, Op.cit.,hlm. 92-93

³⁶ Ali Muhammad dan Ali Maksum, Op.cit.,hlm. 92-93

³⁷ Ali Muhammad dan Ali Maksum, Op.cit.,hlm. 92-93

³⁸ Ali Muhammad dan Ali Maksum, Op.cit.,hlm. 92-93

Kasus ini mendapatkan perhatian dari beberapa pakar yang memiliki berbagai perspektif, contohnya adalah Nik Anuar Nik Mahmud, seorang peneliti yang berasal dari Malaysia, mengatakan bahwa Malaysia lebih berhak untuk mendapatkan kekuasaan atas Sipadan dan Ligitan. Kemudian sejalan dengan Nik Anuar Nik Mahmud, menurut J.G Merrills memberikan pendapat bahwa bukti-bukti yang ada tidak dapat menjadi bukti yang kuat untuk menjadi landasan argumen dalam persidangan di Mahkamah Internasional³⁹.

Pasca hasil keputusan dan kemenangan Malaysia atas kasus Pulau Sipadan dan Ligitan, hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia menjadi lebih sulit dikarenakan pihak Indonesia banyak tidak puas terhadap hasil keputusan ini.

5. Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Setahun setelah memimpin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dihadapkan dengan permasalahan yang serius, yaitu terkait dengan Blok Ambalat. Sengketa Blok Ambalat terjadi di tahun 2005, sengketa ini terjadi adalah akibat dari semakin meluas wilayah Malaysia setelah Malaysia memenangkan kasus Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional.

Sengketa Blok Ambalat mulai memanas ketika Malaysia menentukan konsesi explorasi minyak di Blok Ambalat, sementara wilayah tersebut masih dalam status konflik karena diklaim oleh Indonesia dan Malaysia sejak 1979 yang tidak diterima oleh pihak Indonesia. Indonesia mengklaim Blok Ambalat adalah berdasarkan Perjanjian antara Inggris dan Belanda tahun 1981⁴⁰.

³⁹ Maksum, Ali, Op.cit., hlm. 7-8

⁴⁰ Ali Muhammad dan Ali Maksum, Op.cit., hlm. 92-93

Sengketa ini terus memanas ketika Indonesia mulai mengirimkan personil militer. Kemudian hal ini semakin keruh karena Indonesia berhasil merebut Karang Unarang milik Malaysia dan berhasil membangun tiga merkusuar. Terjadi beberapa kali perundingan, namun tidak menghasilkan kesepakatan karena dua negara tetap mempertahankan masing-masing argumen, Indonesia yang pernah mengalami kejadian serupa tidak akan menyerahkan sengketa ini ke Mahkamah Internasional, walaupun perundingan terus berjalan Indonesia tetap menyiapkan pasukan militernya untuk dikirim ke wilayah sengketa⁴¹.

Kemudian pertemuan di tahun 2006, sedikit mengurangi ketegangan antara kedua negara, kedua negara mencoba diskusi dan memanfaatkan wilayah sengketa dengan menjadikan Blok Ambalat menjadi wilayah potensi ekonomi yang produktif. walaupun tidak adanya suatu yang baru dari sengketa Blok Ambalat, itu merupakan pertemuan yang pertama kali membahas tentang kemungkinan *Joint Development* di dalam wilayah sengketa⁴².

Selain itu, permasalahan yang terjadi adalah terkait dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), terdapat beberapa kasus yang terkait dengan TKI di Malaysia, seperti dianiaya oleh majikan, bunuh diri, bahkan pekerja profesional juga mendapatkan perlakuan buruk, seperti kasus yang menimpa wasit kejuaraan Karate asal Indonesia, dihajar oleh pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM). Isu TKI menjadi isu yang membuat hubungan Indonesia dan Malaysia menjadi terus memburuk, menurut data KBRI, terdapat 289 kasus penganiayaan terhadap TKI khususnya TKW Indonesia di Malaysia selama kurun waktu 2 tahun⁴³.

⁴¹ Ali Muhammad dan Ali Maksum, Op.cit., hlm. 92-93

⁴² Ali Muhammad dan Ali Maksum, Op.cit., hlm. 92-93

⁴³ Maksum, Ali, Op.cit., hlm. 30-32

Di era SBY Jilid II, tahun 2009 konflik Blok Ambalat kembali terjadi, tetapi menurut pihak Indonesia kasus ini sedikit berbau politis. Namun sempat terjadi ketegangan ketika Indonesia dan Malaysia mengirimkan militer ke daerah konflik.

Kapal perang Malaysia sering memasuki perairan Ambalat dan kemudian, pernah terjadi kejar-kejaran antara kedua kapal perang Indonesia dan Malaysia selama 1,5 Jam yang kemudian kapal perang Indonesia berhasil mengusir keluar kapal perang Malaysia. Indonesia juga sempat melakukan gelar pasukan dan mengirimkan tujuh kapal perang ke perairan Ambalat.

Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2010, hubungan Indonesia dan Malaysia kembali memanas ketika ditangkapnya tiga orang petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh polisi laut Malaysia. kasusnya adalah saat itu ketiga petugas itu menangkap tujuh orang nelayan ilegal berasal dari Malaysia, perlakuan buruk didapat tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut⁴⁴.

Dalam kasus ini, berbeda dengan masyarakat Indonesia yang protes keras terhadap Malaysia, salah satunya dengan unjuk rasa ke Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, SBY tidak melakukan protes keras terhadap Malaysia, tetapi melakukan langkah diplomasi terhadap Malaysia untuk menurunkan tensi ketegangan kedua negara. SBY dengan Pidatonya di Markas Besar TNI, memberikan alasan kenapa Indonesia melakukan langkah diplomatik dibanding dengan menggertak Malaysia⁴⁵.

⁴⁴ Mohammad Rosyidin. *“Soft Diplomacy SBY dalam Konflik Indonesia-Malaysia: Studi Kebijakan SBY terhadap Pelanggaran Kedaulatan oleh Malaysia di Perairan Bintan Tahun 2010”*. Jurnal Kajian Wilayah LIPI, Vol. 5, No.1, 2014, hal 3

⁴⁵ Ibid

6. Era Pemerintahan Jokowi

Dalam pemerintahan Jokowi, masalah TKI menjadi isu utama permasalahan bagi kedua negara. Sejak dilantiknya Jokowi ditahun 2014, sudah cukup banyak kasus yang terjadi terhadap TKI di Malaysia. Penganiayaan, dijadikan budak untuk dijual, dan berbagai macam lainnya. Contoh kasus yang melibatkan kedua negara adalah ketika seorang TKI terlibat kasus narkoba dan pengadilan Malaysia memvonis hukuman mati terhadap TKI tersebut dikarenakan telah menyelundupkan narkoba, pihak Indonesia berupaya untuk membantu dan mengadvokasi TKI tersebut, tetapi pihak Malaysia tetap terus melaksanakan vonis pengadilan⁴⁶.

Isu permasalahan TKI yang paling menjadi perhatian adalah tentang perlindungan TKI di Malaysia, dari kasus-kasus yang melibatkan TKI, rata-rata permasalahannya adalah penganiayaan, hal ini tentunya menjadi perhatian pemerintah Indonesia terhadap Malaysia yang seharusnya turut melindungi TKI dikarenakan, salah satu bagian pembangunan negara Malaysia secara infrastruktur dan ekonomi, adalah pekerja dari Indonesia⁴⁷.

B. Era Kerjasama

Dalam hubungan diplomatik antar dua negara, tentunya pasti akan memiliki permasalahan-permasalahan, terutama bagi Indonesia dan Malaysia yang memiliki batas laut dan udara secara langsung. Namun di dalam hubungan itu pula, tentunya didominasi kerjasama-kerjasama untuk menguntungkan satu sama lain dan untuk perkembangan masing masing negara.

⁴⁶ Ali Maksum. "Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Hubungan Indonesia-Malaysia Era Jokowi". Jurnal PIR, Vol.2, No.1, 2017

⁴⁷Ibid

1. Era Pemerintahan Soekarno

Dalam era pemerintahan Soekarno prestasi paling besar adalah dibangunnya hubungan diplomatik oleh Soekarno dengan Malaysia pada saat pertama kali Malaysia merdeka dan saat itu masih bernama Tanah Melayu. Sebenarnya Indonesia semangat dengan merdekanya saudara serumpunnya, yakni Tanah Melayu, karena pada saat itu semangat “Nasionalisme” menjadi penguat antara para pemuda-pemuda Indonesia dan Malaysia untuk melawan penjajahan saat itu⁴⁸.

2. Era Pemerintahan Soeharto

Menurut Tun Mahatir dan mantan Menteri Luar Negeri Malaysia, era Pemerintahan Soeharto adalah masa Keemasan hubungan Indonesia dan Malaysia, hal ini dipertegas karena setelah terjadinya konfrontasi, hubungan Indonesia dan Malaysia cenderung terus membaik.

Soeharto merupakan sosok yang sangat dekat dengan Malaysia, dan berhasil kembali membawa hubungan Indonesia dan Malaysia kembali harmonis, momentumnya adalah ketika dilakukannya perjanjian untuk menormalisasi hubungan kedua negara pasca konfrontasi di Bangkok pada 11 Agustus 1966, Indonesia diwakili oleh Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia dan Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak sebagai Wakil Perdana Menteri Pertahanan Malaysia.

Perbaikan hubungan Indonesia dan Malaysia berdampak kepada integrasi negara-negara Asia Tenggara, yakni dengan pembentukan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) di tahun 1967. Semakin lama hubungan Indonesia dan Malaysia semakin harmonis, dibuktikannya dengan berbagai macam kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara,

⁴⁸ Maksum, Ali, Op.cit., hlm.30-32

salah satunya adalah dibidang pendidikan, Indonesia mengirimkan guru dan dosen berjumlah 17 orang untuk membantu Malaysia mendirikan universitas nasional yang sekarang dikenal dengan Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) di tahun 1970⁴⁹.

Indonesia telah menganggap Malaysia sebagai “Saudara Muda” untuk menjadi mitra kerja di ASEAN, hal ini dibuktikan dengan mulainya Malaysia mengikuti gaya perpolitikan Indonesia untuk menciptakan stabilitas didalam negeri, mereka melakukan terinspirasi terhadap kemenangan mutlak Partai Golkar. Kemudian setelah kemenangan mutlak Partai Golkar, Menteri Dalam Negeri Malaysia, memberikan usulan yakni menciptakan gagasan Barisan Nasional dan kemudian mengkordinasikan berbagai partai politik, dan terutama berdasarkan pada ras⁵⁰.

Meningkatnya hubungan Indonesia dan Malaysia sebenarnya juga turut membuat para pelajar Malaysia ingin menuntut ilmu di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelajar yang berasal dari Malaysia mendaftarkan diri menjadi mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia di era 1970an hingga 1980an. Kemudian Indonesia dan Malaysia juga melakukan kesepakatan di bidang bahasa, yaitu disepakatinya sistem ejaan bersama pada tahun 1972⁵¹.

Hubungan Indonesia dan Malaysia di era Soeharto juga didukung dengan eratnya hubungan pribadi antara Soeharto dengan Tun Mahathir bin Muhammad. Mahathir bahkan mengatakan “saya menilai Pak Harto sangat beradab dan mempunyai sifa-sifat yang baik. Orang Melayu paham yang menghormati tamu”. Pernyataan ini tentunya menjadi bukti

⁴⁹ Maksum, Ali, Op.cit., hlm. 20-22

⁵⁰ Ivan Aulia Ahsan. “*Soeharto-Mahathir: Kemesraan Antara Indonesia-Malaysia*” . diakses dari <https://tirto.id/soeharto-mahathir-kemesraan-antara-indonesia-malaysia-cu4R> pada tanggal 15 Februari 2019 Pukul 21.10 WIB

⁵¹ Ibid

bahwa hubungan personal Soeharto dan Mahathir terbilang cukup harmonis, karena Mahathir menganggap Soeharto adalah sosok yang tidak pernah membuat sesuatu yang mudah menjadi sulit, terutama menyangkut hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia⁵².

3. Era Pemerintahan Megawati

Kerjasama yang terjadi di era kepemimpinan Megawati adalah ketika mulai terjadinya perubahan terhadap politik internasional setelah serangan 11 September 2001 di gedung WTC New York, Amerika Serikat. Kedua negara sama-sama waspada terhadap ancaman teroris dan salah satu hasil kerjasamanya adalah kerjasama *Malaysia-Indonesia Coordinated Patrol (Malindo Corpat)* yang kemudian ditandatangani di tahun 2004 untuk menjaga Selat Malaka⁵³.

4. Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Di era pemerintahan SBY Jilid I, kerjasama Indonesia dan Malaysia sudah mulai dan disepakati di tahun 2006, ketika Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi melakukan kunjungan ke Istana Negara Bung Hatta di Sumatera Barat. Kesepakatan dilakukan untuk kemajuan diberbagai bidang⁵⁴.

Seperti bidang ekonomi, keamanan, dan juga pendidikan, dan juga pemimpin Indonesia dan Malaysia sepakat untuk terus melakukan perundingan terkait menentukan batas wilayah darat maupun laut. Kesepakatan lainnya adalah terkait dengan maraknya kasus terorisme, salah satu menjadi

⁵² Ibid

⁵³ Maksum, Ali, Op.cit., hlm. 28

⁵⁴ Detik News. "*RI-Malaysia Sepakati Kerjasama di Segala Bidang*". Diakses dari <https://news.detik.com/berita/517625/ri-malaysia-sepakati-kerjasama-di-segala-bidang> pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 22.39 WIB

instrumen kerjasama ini adalah Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan juga Polis Diraja Malaysia (PDRM)⁵⁵.

Di kerjasama ekonomi, kerjasama kedua negara cukup berkembang, dibawah ini adalah tabel perkembangan kerjasama ekonomi Indonesia dan Malaysia:

⁵⁵ Ibid

Tabel 2.1 Perkembangan Kerjasama Ekonomi Indonesia dan Malaysia

NO	Transkaksi	Jumlah	
		Ekspor Indonesia ke Malaysia	Impor Indonesia Ke Malaysia
1	Ekspor dan Impor	Ekspor Indonesia ke Malaysia	Impor Indonesia Ke Malaysia
		3,0 (2004)	1,6 (2004)
		3,4 (2005)	2,1 (2005)
		4,1 (2006)	3,1 (2006)
		5,0 (2007)	6,4 (2007)
		6,4 (2008)	8,9 (2008)
		6,8 (2009)	5,6 (2009)
2	Investasi	Investasi Indonesia ke Malaysia	Investasi Malaysia ke Indonesia
		87.4 (Million USD) (2009)	328.7 (Million USD) (2009)

Sumber: Maksum, Ali. "Menyingkap Takbir Hubungan Indonesia-Malaysia".

(Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta, 2017), hlm. 20-22

Kemudian kerjasama Indonesia dan Malaysia di era Pemerintahan SBY Jilid II merupakan lanjutan dari kerjasama Indonesia dan Malaysia jilid I, hal ini karena setiap kerjasama yang dilakukan adalah hasil pertemuan tahunan antar kedua pemimpin negara.

Isu ekonomi dan Investasi dan terutama isu TKI menjadi perhatian bagi kedua negara khususnya Indonesia. pertemuan tahunan menjadi andalan bagi Indonesia dan Malaysia dan juga dirasa efektif untuk memastikan kesinambungan kerjasama bagi kedua negara⁵⁶.

5. Era Pemerintahan Jokowi

Era Jokowi, hubungan Indonesia terus mengalami peningkatan, seperti hubungan Presiden sebelumnya, Jokowi mencoba terus membuat hubungan Indonesia dan Malaysia terus membaik, hal ini dibuktikan dengan Malaysia menjadi negara ASEAN pertama yang di kunjungi oleh Jokowi setelah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengartikan bahwa Jokowi menjadikan Malaysia sebagai negara prioritas untuk melakukan hubungan kerjasama bilateral⁵⁷.

Dalam hal kerjasama Indonesia dan Malaysia di awal pemerintahan Jokowi, diprioritaskan tiga bidang dalam kerjasama, pertama tentang Buruh Migran Indonesia (BMI). Permasalahan ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia karena tingginya tingkat kasus di Malaysia yang terkait dengan Buruh Migran Indonesia. Diketahui di Malaysia terdapat 2,5 juta jiwa warga Indonesia di Malaysia, setengahnya adalah buruh migran yang berstatus ilegal⁵⁸.

Kemudian perundingan masalah perbatasan menjadi salah satu prioritas Pemerintahan Jokowi. Kedua negara menyetujui untuk kemudian melakukan negosiasi secara rutin. Dalam hal

⁵⁶ BBC. *"Indonesia dan Malaysia Kawal Kerjasama Strategis"*. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/12/131219_ri_malaysia_pertemuan_pada_tanggal_15_Februari_2019_pukul_23.08_WIB

⁵⁷ Adirini Pujayanti. *"Arah Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia di Masa Pemerintahan Jokowi"*. Jurnal Info Singkat HI DPR, Vol VII, No. 031/I/P/P3DI, 2015, hal. 3-8

⁵⁸ Ibid

ini Indonesia dan Malaysia akan mendiskusikan *roadmap* untuk pertemuan perundingan secara langsung⁵⁹.

Yang ketiga adalah, peningkatan kerjasama ekonomi, dalam hal ini Malaysia merupakan negara dengan peringkat ke-5 terbesar sebagai negara yang berinvestasi di Indonesia sekaligus juga sebagai mitra dagang. Di data tahun 2014, investasi Malaysia di Indonesia senilai 711 juta dolar AS dan akan diperkirakan akan terus tumbuh⁶⁰.

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Ibid